



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN FISKAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJAKA KUSMARTATA
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MADYA
3. NHK : 31847

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.982.776.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m²/342 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 123.776.000
3. Tanah Seluas 3500 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 287.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
5. Tanah Seluas 252 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/29 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m²/90 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/150 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 643.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER / 2.5 G AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO/NC11A2CB AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



3. MOBIL, WUILING ALMAZ RS PRO Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 389.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 227.235.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.912.511.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.912.511.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.